

## MEMBANGUN WAWASAN GLOBAL WARGA NEGARA MUDA BERKARAKTER PANCASILA

Mukhamad Murdiono<sup>1)</sup>, Sapriya, Abdul Azis Wahab, Bunyamin Maftuh<sup>2)</sup>

<sup>1)</sup>Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta

<sup>2)</sup>Sekolah Pascasarjana, Universitas Pendidikan Indonesia

e-mail: mukhamad\_murdiono@uny.ac.id

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana membangun wawasan global warga negara muda berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*. Sumber data terdiri dari sumber kepustakaan dan responden yang dipilih dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan analisis induktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara muda. Sila kedua Pancasila menjadi pintu utama pengembangan wawasan global warga negara muda. Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara, membawa implikasi bahwa warga negara muda di sekolah tidak hanya menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai slogan, melainkan harus diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

**Kata Kunci:** *wawasan global, warga negara muda, Pancasila*

## BUILDING A GLOBAL PERSPECTIVE OF YOUNG CITIZENS HAVING PANCASILA CHARACTER

**Abstract:** This research aims to find out how to build a global perspective of young citizens based on the values of *Pancasila* as the character of the Indonesian nation. This research used a qualitative approach with a grounded theory method. The data sources consisted of literature and respondents selected using a purposive sampling method. Data collection techniques used documentation and interviews. The data were analyzed using inductive analysis. The results showed that the values of Pancasila as the character of the Indonesian nation must be used as the basis to build a global insight of young citizens. The second pillar of Pancasila became the main gate to building a global insight of young citizens. Pancasila as the basis for building a global insight of young citizens brought the implication that young citizens in the school did not only use the values of Pancasila as a slogan, but must be applied and implemented in their daily lives.

**Keywords:** *global insight, young citizens, Pancasila*

### PENDAHULUAN

Kemajuan di bidang teknologi, terutama teknologi komunikasi dan informasi, menyebabkan informasi yang datang dari negara lain dapat dengan mudah masuk ke suatu negara. Informasi dengan cepat mengalir ke berbagai belahan dunia dengan bantuan teknologi internet. Penggunaan teknologi internet memudahkan orang di seluruh penjuru planet bumi untuk mengakses informasi tanpa mengenal batas waktu dan wilayah. Internet dapat

berperan dalam pertukaran informasi dan ide-ide antara pemerintah dan warga negara (Kim *et al.*, 2011: 809). Informasi yang datang silih berganti memiliki dampak terhadap kehidupan warga negara di dunia. Ideologi, gaya hidup, dan keyakinan atau kepercayaan yang berkembang di suatu negara dapat mempengaruhi kebiasaan dan pola-pola kehidupan yang sudah mapan di negara lain.

Nilai-nilai dasar dalam bentuk ideologi bangsa yang telah lama dijadikan se-

bagai landasan bagi kehidupan warga negara perlahan-lahan mulai terkikis. Gejala mulai terkikisnya nilai-nilai dasar ini sangat kentara dari perilaku yang ditunjukkan generasi muda. Perilaku yang menjadi kecenderungan global, seperti gaya hidup yang hedonis dan konsumtif sangat mudah ditiru oleh generasi muda. Apabila perilaku imitatif berlebihan terhadap kecenderungan global dibiarkan, tidak menutup kemungkinan nilai-nilai dasar itu dapat luntur dan pudar. Pemuda memang produk zamannya, generasi muda di era global lebih pragmatis dalam menentukan pilihan. Kaum muda seperti tidak memiliki idealisme lagi, dan yang lebih mengemuka adalah perilaku egoisme dan konsumerisme. Jajak pendapat yang diselenggarakan Litbang harian Kompas pada 21-24 Oktober 2012 terhadap 819 responden yang minimal berusia 17 tahun menunjukkan bahwa pemuda dianggap terlalu sibuk dengan persoalan internal dirinya dan berorientasi kepada diri sendiri (egois) sehingga cenderung mengabaikan masyarakat. Penilaian ini diungkapkan oleh 73,1 persen responden (Wardhani, 2012: 5).

Kecenderungan dan gaya hidup yang berkembang di negara maju akan diikuti oleh negara-negara yang sedang berkembang. Pola hidup konsumerisme dan hedonistik yang tumbuh subur di masyarakat Barat dengan budaya individualisme, perlahan mencemari budaya luhur bangsa-bangsa Timur yang terkenal santun dan memiliki semangat kolektivisme kuat. Globalisasi yang terus berkembang di abad ke-21 mempengaruhi setiap aspek kehidupan masyarakat, termasuk keyakinan, norma-norma, nilai-nilai, dan perilaku, serta ekonomi dan perdagangan (Banks, 2008: 132). Persoalan kecenderungan global yang dapat mengikis nilai-nilai luhur bangsa perlu dihadapi dan diberikan jalan keluar. Salah

satu cara yang dapat dilakukan, yaitu dengan penguatan nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan sebagai landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melalui jalur pendidikan, khususnya pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam melakukan penguatan nilai-nilai yang dijadikan sebagai falsafah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut Nussbaum (Banks, 2008:134), pendidikan kewarganegaraan harus membantu siswa mengembangkan identitas dan keterikatan pada komunitas global dan hubungan manusia kepada orang lain di seluruh dunia. Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membangun generasi muda menjadi warga negara yang cerdas dan baik (*smart and good citizen*). Warga negara yang baik setidaknya tercermin dari tiga aspek utama pendidikan kewarganegaraan yang bermutu. Ketiga aspek itu meliputi: (1) pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*); (2) kecakapan kewarganegaraan (*civic skills*); dan (3) watak-watak kewarganegaraan (*civic dispositions*) (Branson, 1999:8). Pengetahuan kewarganegaraan antara lain berkaitan dengan apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Kecakapan kewarganegaraan dalam suatu negara dapat berupa kecakapan intelektual dan partisipatoris. Watak-watak kewarganegaraan merupakan sifat-sifat publik dan privat utama yang dimiliki warga negara untuk pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konstitusional.

Memasuki paruh awal abad ke-21, setiap negara di dunia akan menghadapi berbagai permasalahan global yang perlu ditangani dengan serius. Menurut Cogan (1998:7), ada tiga permasalahan global utama yang dihadapi negara-negara di seluruh dunia. Ketiga permasalahan itu

meliputi: (1) berkembangnya ekonomi global; (2) semakin pesatnya kemajuan teknologi dan komunikasi; dan (3) meningkatnya populasi penduduk dunia yang diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan. Pendapat senada dikemukakan Titus (1999:133) yang menyatakan bahwa dunia semakin kompleks dan saling terkait. Kompleksitas itu memunculkan serangkaian persoalan lintas negara, seperti: penolakan dan pengaturan senjata nuklir, polusi lingkungan yang mendunia, dan munculnya kekuatan ekonomi dunia yang saling terkait.

Di bidang ekonomi, berkembangnya ekonomi global menyebabkan pergeseran secara bertahap dari produksi barang-barang manufaktur menuju layanan atau jasa. Distribusi produksi barang dan jasa semakin gencar melewati batas-batas negara. Globalisasi ekonomi yang didorong oleh "neoliberalisme" secara dramatis mempengaruhi hidup warga negara di seluruh dunia dengan membangun sistem "kapitalisme global" (Machida, 2011:119). Selain itu, muncul tantangan berupa liberalisasi ekonomi dan pasar bebas yang dapat mengaburkan batas-batas otoritas ekonomi dan politik suatu bangsa. Ohmae menggambarkan secara gamblang, bahwa negara adalah *'the artefact of the 18th and 19th centuries'* yang pada waktu itu tapal batas sebuah negara masih cukup jelas dan penting, tetapi kini negara telah lenyap karena kegiatan ekonomi di tingkat global yang ditandai dengan masuknya *'capital markets'* secara bebas ke negara manapun sehingga menafikan batas-batas tersebut (Manan & Lan, 2011:5). Dengan demikian, di era pasar bebas, negara harus terlibat secara aktif dengan cara membuka pasar untuk dimasuki produk-produk dari negara lain.

Permasalahan kedua yang menjadi kecenderungan global adalah kemajuan

teknologi dan komunikasi. Kemajuan teknologi informasi merupakan salah satu faktor penting yang mendukung proses globalisasi (Machida, 2011:125). Perkembangan teknologi yang sangat cepat mempengaruhi hampir setiap kegiatan manusia di dunia. Pengaruh besar kemajuan teknologi yang paling terasa menyentuh kehidupan masyarakat adalah adanya perkembangan teknologi komputer. Aktivitas manusia dalam kehidupan sehari-hari hampir dapat dipastikan, baik secara langsung maupun tidak langsung, akan bersentuhan dengan kemajuan teknologi komputer. Orang akan menggunakan komputer di tempat kerja, di sekolah, di rumah, bahkan memanfaatkan waktu luang untuk bermain-main dengan komputer. Melalui teknologi komputer, orang semakin mudah tersambung dengan jaringan yang ada di dunia.

Permasalahan ketiga yang menjadi kecenderungan global adalah meningkatnya populasi penduduk dunia yang diikuti dengan munculnya permasalahan lingkungan. Populasi penduduk di bumi terus meningkat dari hampir enam miliar pada akhir abad ke-20 akan terus meningkat menjadi sekitar delapan miliar pada tahun 2025 (Cogan, 1998: 10). Populasi penduduk dunia yang terus meningkat semakin menambah kompleksnya permasalahan global yang dihadapi oleh seluruh umat manusia di muka bumi. Kastil dan Davidson mengemukakan bahwa di era global batas-batas nasional mengikis karena jutaan orang tinggal di beberapa negara dan memiliki kewarganegaraan ganda. Jutaan orang memiliki kewarganegaraan dalam satu bangsa dan hidup di tempat (bangsa) lain. Jumlah individu yang tinggal di luar tanah air mereka menurut Benhabib terus meningkat dari sekitar 33 juta pada tahun 1910 menjadi 175 juta pada tahun 2000. Migrasi di

seluruh dunia telah meningkatkan keragaman di sebagian negara-negara dan bangsa-bangsa di dunia (Banks, 2008: 132). Kondisi semacam ini memaksa setiap negara dan bangsa untuk memikirkan kembali kewarganegaraan dan pendidikan kewarganegaraan.

Penduduk yang terus bertambah akan berdampak besar pada munculnya permasalahan lingkungan. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya perlu makan, mendapatkan pekerjaan, dan berusaha mencari kualitas kehidupan yang layak. Akibatnya, muncul permasalahan-permasalahan lingkungan seperti perusakan lahan subur, menipisnya sumber daya alam, perusakan hutan, menipisnya ketersediaan air bersih, dan lain-lain. Negara-negara di dunia banyak yang berusaha untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan eksploitasi terhadap sumber daya alam. Padahal pemanfaatan sumber daya alam akan berhasil meningkatkan kesejahteraan rakyat jika negara memiliki sumber daya manusia yang berkualitas tinggi. Studi empiris yang dilakukan Brooks dan Kurtz terhadap 98 negara di dunia pada tahun 1979-2000 menemukan bahwa produksi sumber daya alam dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi hanya di negara-negara yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang berkualitas (Rudra & Jensen, 2011:651).

Di sisi lain, arus globalisasi yang melintasi batas-batas negara dikhawatirkan dapat berdampak pada lunturnya nilai-nilai luhur yang dimiliki suatu bangsa. Bagi Indonesia, proses globalisasi tidak dapat dinafikan akan bersinggungan atau bahkan melunturkan nilai-nilai nasionalisme. Disadari atau tidak nasionalisme Indonesia saat ini masih terus berkembang dan belum sepenuhnya terbangun dengan

kokoh. Proses globalisasi secara konseptual selama ini dianggap mendatangkan permasalahan bagi nasionalisme. Menurut Seda (2011: 138) keresahan akan lunturnya nilai-nilai nasionalisme dalam konteks proses globalisasi dikarenakan konsep nasionalisme senantiasa dikaitkan dengan negara-bangsa, dimana peran negara masih sangat dominan. Nasionalisme tidak dikaitkan dengan konsep pasar dan komunitas.

Nasionalisme selama ini diasumsikan hanya mungkin terjadi dalam konteks negara-bangsa bukan dalam kaitannya dengan pasar dan komunitas. Akibatnya, ketika peran pasar dan komunitas menguat secara politis, ekonomis, dan sosial mengimbangi kekuatan negara bahkan dalam jangka pendek dapat melampaui kekuatan negara, akan dianggap sebagai ancaman serius bagi nasionalisme. Negara tidak menjadi lemah karena proses tersebut, namun terjadi tarik ulur antara tiga pusat kekuatan yaitu negara bangsa, pasar, dan komunitas. Kekuatan pasar ditandai dengan proses globalisasi dan komunitas dicirikan oleh otonomi daerah. Selama nasionalisme hanya dikaitkan dengan negara-bangsa maka selama itu pula proses globalisasi dan otonomi daerah akan dianggap sebagai ancaman. Perlu ada perubahan dalam memaknai dan mengimajinasikan diri. Globalisasi seharusnya tidak hanya dilihat sebagai ancaman serius bagi suatu negara, tetapi juga sebagai tantangan sekaligus peluang bagi kita di masa depan (Seda, 2011:142).

Permasalahan-permasalahan global lintas negara yang muncul sebagai akibat gempuran globalisasi dan kemajuan teknologi yang begitu pesat memerlukan pemecahan melalui pendekatan baru dalam pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan baru ini disebut Titus sebagai *civic education* untuk pemahaman global, yaitu be-

rupa cara pandang dan dedikasi baru pada pendidikan kewarganegaraan. Pendekatan ini pernah diujicobakan oleh Boulding di Amerika dengan kesimpulan bahwa warga Amerika mengakui sebagai penduduk planet yang menjadi desa buwana (*global village*) (Titus, 1999:131-132). Keadaan seperti ini mensyaratkan perhatian dan aksi warga negara pada skala lintas negara dan lintas budaya. Dengan demikian, jelas perlu ada perspektif baru dalam mengembangkan budaya yang disebut Boulding sebagai "*global civic culture*" atau yang sekarang biasa dikenal dengan "*transnational civil society*" (Parker *et al.*, 1999:130).

Pendidikan kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam membangun wawasan global warga negara. Pendidikan kewarganegaraan tidak sebatas mempelajari hak dan kewajiban warga negara, melainkan lebih luas dan mendalam termasuk mempersiapkan warga negara menjadi warga global. Pendidikan kewarganegaraan membekali peserta didik di sekolah dengan pengetahuan tentang isu-isu global, budaya, lembaga dan sistem internasional dan merupakan indikasi dari pendekatan minimalis yang bisa mengambil tempat secara eksklusif di dalam kelas. Osler dan Starkey mengemukakan bahwa pendidikan kewarganegaraan mencerminkan pendekatan maksimal yang bertujuan untuk memastikan peserta didik siap untuk mengambil peran sebagai warga global dewasa dan bertanggung jawab (Bourke *et al.*, 2012:163).

Warga negara muda atau generasi muda memiliki peran penting dalam pergaulan internasional. Di dunia, ada banyak forum atau organisasi internasional yang didirikan oleh para pemuda. Forum atau organisasi itu dibentuk sebagai wadah untuk melakukan kegiatan kepemudaan tingkat internasional. Generasi muda Indonesia

perlu untuk turut serta dan terlibat dalam berbagai organisasi atau forum internasional. Keterlibatan warga negara dalam organisasi sipil menurut Putnam dapat menanamkan kerja sama serta rasa tanggung jawab bersama untuk melakukan upaya kolektif (Uslaner & Conley, 2003:332). Keterlibatan generasi muda Indonesia dalam forum-forum kepemudaan internasional harus dibekali dengan berbagai pengetahuan atau wawasan global. Salah satu cara yang dapat dilakukan, yaitu mengembangkan wawasan global warga negara muda melalui pendidikan kewarganegaraan di sekolah.

Pentingnya pemahaman warga negara tentang wawasan global pernah dikumandangkan oleh Soekarno menjelang kemerdekaan. Pada saat menyampaikan pidato tentang dasar negara di hadapan sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang pertama (29 Mei – 1 Juni 1945), Soekarno mengungkapkan bahwa kebangsaan yang dianjurkan bukanlah kebangsaan yang menyendiri (*chauvinisme*) melainkan kebangsaan yang menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa di dunia (*internasionalisme*). Lebih lanjut, dalam pidatonya, Soekarno mengatakan bahwa "internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam tamansarinya internasionalisme" (Latif, 2011:126). Gagasan Soekarno tentang internasionalisme ini kemudian menjadi cikal bakal pentingnya keterlibatan Indonesia dalam kancah pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Menumbuhkan semangat nasionalisme sebagai bangsa yang baru berdiri ketika itu memang sangatlah penting, namun bangsa Indonesia juga menyadari sebagai bagian dari bangsa-bangsa di dunia. Oleh karena itu, bang-

sa Indonesia perlu melibatkan diri dalam kancah pergaulan bangsa-bangsa di dunia.

Internasionalisme yang digagas Soekarno bukan dalam arti kosmopolitanisme yang tidak mengakui adanya kebangsaan, melainkan internasionalisme yang masih memiliki keterkaitan erat dengan nasionalisme (Fatwa, 2010: 201). Gagasan Soekarno tentang internasionalisme kemudian muncul dalam pembukaan (*preamble*) Undang-Undang Dasar 1945 sebagai salah satu tujuan berdirinya negara Republik Indonesia. Dalam alinea keempat pembukaan disebutkan bahwa tujuan berdirinya negara Republik Indonesia yaitu: (1) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (2) memajukan kesejahteraan umum; (3) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (4) ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tiga tujuan pertama sebagai tujuan internal dan satu tujuan yang terakhir sebagai tujuan eksternal. Dengan demikian, dapat dimaknai bahwa pemahaman tentang wawasan global bagi warga negara sangatlah penting.

Dari uraian permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka perlu kajian mendalam melalui penelitian tentang bagaimana membangun wawasan global warga negara muda berkarakter pancasila. Mengembangkan kerangka konseptual-filosofis tentang pendidikan kewarganegaraan global berlandaskan pada Pancasila sebagai falsafah bangsa Indonesia merupakan langkah mendesak dan strategis sebagai bagian dari pengembangan dasar pijakan bagi pembuatan kebijakan pendidikan berwawasan global yang berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila secara lebih luas. Hasil kajian melalui penelitian diharapkan akan memperkaya baik secara teoretis maupun praktis dalam mengem-

bangkan pendidikan berwawasan global berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia.

## METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *grounded theory*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif karena menekankan pada hakikat realitas sosial yang dibangun berdasarkan keadaan yang senyatanya terjadi. Peneliti dan apa yang diteliti memiliki hubungan yang sangat dekat (Denzin & Lincoln, 2005: 10; Flick *et al.*, 2004: 3). Dalam penelitian kualitatif, peneliti menggunakan dan mengumpulkan berbagai data empiris yang menggambarkan peristiwa-peristiwa yang dialami dan permasalahan serta makna dalam kehidupan individu. Peneliti membuat gambaran holistik lengkap yang dibentuk melalui susunan kata-kata, melaporkan pandangan-pandangan para informan secara rinci, dan melakukan penelitian secara alamiah.

Penelitian kualitatif sering juga disebut sebagai penelitian naturalistik, sebab situasi lapangan penelitian bersifat natural atau wajar, sebagaimana adanya tanpa dimanipulasi atau diatur dengan eksperimen atau tes (Denzin & Lincoln, 2005:3; Nasution, 1988:18). Oleh karena itu, informasi yang diperoleh adalah peristiwa dari situasi yang alamiah tentang membangun wawasan global warga negara muda berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia. Penggunaan metode *grounded theory* dalam penelitian ini dikarenakan data bersifat deskriptif, bertujuan untuk menggambarkan realitas, dan berupaya untuk menemukan teori yang dibangun dari data. Dengan menggunakan metode ini diharapkan teori yang ditemukan berkaitan dengan teori lain dalam bidang mereka masing-masing

secara kumulatif, sehingga implikasi dari teori tersebut akan membawa manfaat (Straus & Corbin, 2009: 12).

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua. *Pertama*, sumber bahan cetak (kepustakaan), meliputi buku teks, dokumen-dokumen kurikulum, jurnal, makalah, kliping, surat kabar, tabloid, dan lain-lain yang berkaitan dengan nilai-nilai Pancasila sebagai landasan untuk membangun wawasan global warga negara muda. *Kedua*, sumber responden (*human resources*), dipilih menggunakan metode *purposive sampling*, yang terdiri dari pakar pendidikan kewarganegaraan, pakar politik internasional/perspektif global, pakar filsafat, dan pakar sejarah.

Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumentasi dan wawancara. Analisis datanya adalah analisis induktif, yakni proses pembahasannya meliputi pola-pola, tema-tema dan kategori-kategori yang berasal dari data, bukan ditentukan sebelum pengumpulan dan analisis data. Analisis data dalam penelitian ini mengikuti langkah-langkah yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1992:20) terdiri atas tiga alur kegiatan yang dilakukan secara bersamaan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila dapat dijadikan sebagai filter terhadap nilai-nilai global yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Membangun wawasan global warga negara muda berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia, sebenarnya secara lebih khusus dapat menggunakan sila kedua, yakni "kemanusiaan yang adil dan beradab" sebagai pintu masuk dalam pergaulan internasional. Sila kedua Pancasila memberi

peluang kepada bangsa Indonesia, untuk masuk dan terlibat dalam pergaulan global. Berdasarkan sila kedua Pancasila, manusia tidak dilihat dari latar belakang bangsanya melainkan dilihat dari kedudukannya sebagai manusia yang memiliki harkat dan maratabat.

Para *founding fathers* ternyata memiliki visi jauh ke depan dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Mereka menyadari bahwa zaman akan terus berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Arus globalisasi yang begitu deras mengalir ke seluruh pelosok penjuru dunia, membawa nilai-nilai global yang dapat berpengaruh terhadap identitas suatu bangsa. Dalam kancah pergaulan global, Indonesia tidak bisa berdiam diri tanpa terlibat dalam interaksi dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Oleh karena itu, perlu dikembangkan ide yang bisa membuka pintu pergaulan internasional.

Sila kedua Pancasila dapat dijadikan sebagai pintu masuk dan landasan oleh bangsa Indonesia dalam pergaulan internasional. Sila "kemanusiaan yang adil dan beradab" memiliki makna ke luar dan ke dalam. Ke dalam memiliki makna melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan memajukan kesejahteraan umum. Ke luar memiliki makna ikut serta melaksanakan ketertiban dunia melalui politik bebas aktif. Dengan demikian, Pancasila sebenarnya memberikan ruang terbuka kepada bangsa Indonesia untuk melakukan interaksi dan terlibat secara aktif dalam pergaulan internasional.

Hasil penelitian lain, menunjukkan bahwa ide kemanusiaan yang dikembangkan dalam sila kedua Pancasila menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk melakukan interaksi dan kerjasama dengan

bangsa lain di dunia. Kemanusiaan dapat melintasi batas-batas lokal, regional, dan nasional suatu bangsa. Manusia akan dilihat dari dimensi harkat dan martabatnya bukan berdasarkan pada latar belakang budaya atau bangsa. Rasa kemanusiaan menjadi landasan bagi setiap manusia di dunia untuk mengembangkan sikap saling tolong menolong. Oleh karena itu, di era modern, penjajahan atas bangsa lain merupakan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Manusia di mana pun berada harus dijunjung tinggi harkat dan martabatnya. Penjajahan di atas muka bumi, apa pun alasannya, sangat bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Nilai kemanusiaan bersifat universal, berlaku di negara mana pun. Ketika membicarakan tentang kemanusiaan dalam konteks pergaulan global, maka sebenarnya mata hati kita bukan hanya tertuju kepada Indonesia, melainkan pada Indonesia di tengah-tengah pergaulan dunia. Oleh karena itu, pada waktu perumusan dasar negara Indonesia, Bung Karno pernah menyampaikan bahwa "orang Indonesia itu harus hidup di tamansari dunia". Artinya, orang Indonesia perlu untuk mengenal atau memiliki wawasan tentang dunia. Wahana untuk mengembangkan wawasan global salah satunya melalui pendidikan kewarganegaraan.

Pendidikan kewarganegaraan yang dikembangkan untuk membangun wawasan global warga negara tidak dapat dilepaskan dari Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Oleh karena itu, dalam membangun wawasan global warga negara muda terlebih dahulu harus memahami dengan benar nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Ada dua hal penting yang perlu dipahami dalam membangun wawasan global warga negara ber-

landaskan pada nilai-nilai Pancasila. Pertama, kita harus memahami Pancasila sebagai konten. Kedua, memahami Pancasila sebagai sikap dan perilaku. Dengan demikian, seharusnya orang Indonesia memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila dan perilakunya dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan kata lain, setiap warga negara Indonesia semestinya bukan hanya menghafal nilai-nilai Pancasila atau menjadikannya sebagai slogan, melainkan harus diterapkan atau diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian seperti telah diuraikan, sesuai dengan pendapat yang dikemukakan Latif (2011:237) yang menyatakan bahwa kemanusiaan menjadi bagian penting yang tidak bisa dipisahkan dari perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai kemerdekaan. Kesadaran pentingnya wawasan global bagi warga negara Indonesia sudah sejak lama menjadi perhatian para pendiri bangsa. Bung Karno mengantisipasi dengan memasukkan internasionalisme sebagai prinsip kedua dalam rancangan dasar negara Indonesia merdeka.

Internasionalisme yang digagas Soekarno bukan berarti kosmopolitanisme yang tidak mengakui adanya kebangsaan. Bung Karno menyatakan bahwa "Internasionalisme tidak dapat tumbuh subur, kalau tidak berakar dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme" (Soekarno, 2006: 107). Gagasan yang dikemukakan Bung Karno inilah yang kemudian menjadi landasan bahwa bangsa Indonesia perlu untuk terlibat aktif dalam pergaulan antarbangsa. Bangsa Indonesia merupakan bagian dari bangsa-bangsa di dunia, sehingga tidak bisa hidup sendirian tanpa menjalin hubungan kerja sama dengan bangsa lain.

Lebih lanjut Latif (2011:239) menyatakan bahwa internasionalisme yang dikembangkan di Indonesia diberi sentuhan dan bobot spirit egalitarianisme. Sebagai warga negara dunia memiliki kesamaan dan kesederajatan antarbangsa. Oleh karena itu, perlu untuk saling menghargai dan menghormati antarsesama warga bangsa dan umat manusia di atas muka bumi. Dengan demikian, nasionalisme yang dikembangkan di Indonesia memperjuangkan kesamaan kemanusiaan. Nasionalisme yang berperikemanusiaan inilah yang kemudian terpatri secara utuh dalam sila kedua Pancasila. Rumusan sila kedua Pancasila menunjukkan bahwa cita-cita kemanusiaan menjadi jiwa kemerdekaan. Gagasan yang dikemukakan oleh para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila, menunjukkan bahwa mereka mampu meneropong jauh ke depan. Mereka menekankan pentingnya prinsip-prinsip yang harus dijunjung tinggi oleh suatu bangsa yang baru merdeka dan beradab.

Makna kemanusiaan dalam sila kedua Pancasila memiliki arti yang sangat luhur dan mulia karena menyatu dengan sifat adil dan beradab. Manusia Indonesia dalam membangun hubungan kemanusiaan antarbangsa maupun intrabangsa harus berpedoman pada nilai-nilai kesederajatan sebagai mahluk Tuhan dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang berlaku universal. Dengan kata lain, manusia sebagai mahluk Tuhan memiliki tempat yang terhormat dan sederajat. Kemanusiaan mendudukan manusia memiliki derajat dan kedudukan yang sama. Oleh karena itu, manusia harus diperlakukan secara adil dan beradab. Manusia tidak boleh dibedakan karena latar belakang budaya, sosial-ekonomi, agama, ras, suku, dan golongan.

Prinsip yang terkandung dalam sila kedua Pancasila sebagai landasan pengembangan wawasan global warga negara adalah prinsip nasionalisme yang luas. Nasionalisme yang digagas Bung Karno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945 bukan nasionalisme yang picik, melainkan nasionalisme yang luas. Soekarno mengatakan "kita cinta tanah air yang satu, merasa berbangsa yang satu, mempunyai bahasa yang satu. Tetapi tanah air kita Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia" (Soekarno, 2006: 107). Kebangsaan yang digagas oleh Bung Karno, bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan *chauvinisme*. Melainkan kebangsaan yang mengakui keberadaan bangsa-bangsa lain di dunia. Bung Karno menginginkan tercapainya persaudaraan dunia. Dengan kata lain, tujuannya bukan hanya mendirikan negara Indonesia merdeka, tetapi juga harus menuju pada kekeluargaan bangsa-bangsa.

Sila "kemanusiaan yang adil dan beradab" menurut Latif (2011:242) memuat prinsip persaudaraan universal yang memberi keseimbangan antara pemenuhan hak individu dan sosial. Prinsip ini pula yang dijadikan sebagai landasan untuk membangun negara-bangsa yang humanis. Prinsip kesamaan kemanusiaan yang adil dan beradab menjadi dasar bagi bangsa Indonesia untuk memiliki komitmen kemanusiaan menembus batas-batas lokal, nasional, atau regional, dan menjangkau persaudaraan antarmanusia dan antarbangsa secara global. Prinsip kedua Pancasila dirumuskan oleh para pendiri bangsa dengan kesadaran bahwa warga negara Indonesia merupakan bagian dari warga dunia yang tidak bisa lepas dari pergualan antarbangsa di dunia. Sila kedua Pancasila menjadi relevan dan landasan yang kuat bagi pengembangan wawasan global warga negara di era global. Pancasila dengan

nilai-nilai luhur yang terkandung di dalamnya dapat dijadikan sebagai pedoman atau pegangan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan dalam pergaulan antarbangsa.

Dari uraian hasil dan pembahasan penelitian yang telah dikemukakan di atas, menunjukkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara muda. Sila kedua Pancasila menjadi pintu utama pengembangan wawasan global warga negara. Kemanusiaan menjadi dasar pentingnya melakukan kerjasama antarbangsa di dunia. Nilai kemanusiaan melintasi batas-batas lokal, regional, dan nasional. Selain itu, nilai kemanusiaan bersifat universal dan berlaku di negara manapun. Dalam konteks pengembangan wawasan global warga negara muda di sekolah, maka Pancasila harus dipahami sebagai konten dan perilaku. Dengan kata lain, seharusnya orang Indonesia memiliki pengetahuan yang benar tentang Pancasila dan perilakunya dapat mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

## PENUTUP

Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Pancasila sebagai karakter bangsa Indonesia harus dijadikan sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara muda. Pancasila sebagai landasan dalam pengembangan wawasan global warga negara, membawa implikasi bahwa warga negara muda di sekolah semestinya tidak hanya menghafal nilai-nilai Pancasila atau menjadikannya sebagai slogan, melainkan harus diterapkan dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai global yang berkembang harus dapat berakomodasi dengan nilai-nilai

Pancasila. Warga negara muda Indonesia yang berjiwa Pancasila harus memiliki wawasan global, karena dalam prinsip kemanusiaan (*humanity*) yang ada pada sila kedua Pancasila mengandung dimensi yang dapat membuat warga negara Indonesia memiliki wawasan global.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Artikel ini merupakan bagian dari penelitian disertasi untuk menyelesaikan program doktor Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia. Ucapan terima kasih peneliti sampaikan kepada Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang telah memberikan bantuan beasiswa BPPS dan semua pihak yang telah membantu penyelesaian penelitian disertasi.

## DAFTAR PUSTAKA

- Banks, J. A. 2008. "Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in A Global Age", dalam *Educational Researcher*, 37 (3), hlm. 129-139.
- Bourke, L., Bamber, P., dan Lyons, M. 2012. "Global Citizens: Who Are They?", dalam *Education, Citizenship and Social Justice*, 7 (2), hlm. 161-174.
- Branson, M.S. 1999. "Dasar-dasar Civic Education", dalam Branson, M.S., dkk. (eds.), *Belajar Civic Education dari Amerika*, alih bahasa Syafruddin, M.Y. Alimi, dan M. N. Khoiron. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation (TAF).
- Cogan, J.J. 1998. "Citizenship Education for The 21st Century: Setting The Context", dalam Cogan, J.J dan Derricot, R. (eds.), *Citizenship for the 21st*

- Century: An International Perspective on Education*. London: Kogan Page Limited.
- Denzin, N. K. dan Lincoln, Y. S. 2005. *The Sage Handbook of Qualitative Research*. California: Sage Publications.
- Fatwa, A. M. 2010. *Pancasila Karya Bersama Milik Bangsa: Bukan Hak Paten Suatu Golongan*. Jakarta: The Fatwa Center.
- Flick, U., Kardorff, E., & Steinke, I. 2004. "What Is Qualitative Research? An Introduction To The Field", dalam Flick, U., Kardorff, E.V., dan Steinke, I. (eds.), *A Companion to Qualitative Research*. London: Sage Publications. Hlm. 3-11.
- Kim, B. J., Kavanaugh, A. L., & Hult, K. M. 2011. "Civic Engagement and Internet Use in Local Governance: Hierarchical Linear Models for Understanding The Role of Local Community Groups", dalam *Administration & Society*, 43 (7), hlm. 807-835.
- Latif, Y. 2011. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Machida, S. 2011. "Globalization and Citizens Support for Global Capitalism: Multi-level Analyses from the World-systems Perspective", dalam *Journal of Developing Societies*, 27 (2), hlm. 119-151.
- Manan, M.A., & Lan, T.J. 2011. "Nasionalisme dan Ketahanan Budaya Indonesia: Sebuah Pengantar, dalam Manan, M.A. dan Lan, T.J. (eds.), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Miles, M. B. & Huberman, A. M. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*, Alih Bahasa T. R. Rohidi. Jakarta: UI Press.
- Nasution, S. 1988. *Metode Penelitian Naturalistik-Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Parker, W.C., Ninomiya, A., & Cogan, J. 1999. "Educating World Citizens: Toward Multinational Curriculum Development", dalam *American Educational Research Journal*, 36 (2), hlm. 117-145.
- Rudra, N. & Jensen, N. M. 2011. "Globalization and the Politics of Natural Resources", dalam *Comparative Political Studies*, 44 (6), hlm. 639-661.
- Seda, F.S. 2011. "Ikatan Budaya, Nasionalisme Indonesia, dan "Ketahanan Budaya" di Tengah Dinamika Globalisasi dengan Desentralisasi: Suatu Kajian Sosiologis, dalam Manan, M. A. dan Lan, T. J. (eds.), *Nasionalisme dan Ketahanan Budaya di Indonesia: Sebuah Tantangan*. Jakarta: LIPI Press bekerja sama dengan Yayasan Obor Indonesia.
- Soekarno. 2006. "Lahirnya Pancasila", dalam Ana, I. D., Hawibowo, S. dan Wahyudi, A. (eds.), *Pemikiran Para Pemimpin Negara tentang Pancasila*. Yogyakarta: Aditya Media dan Pusat Studi Pancasila (PSP), Fakultas Filsafat, Universitas Gadjah Mada.

- Straus, A. & Corbin, J. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik Teoritisasi Data*, alih bahasa M. Shodiq dan I. Muttaqien. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Titus, C. 1999. Civic Education untuk Pemahaman Global, dalam Branson, M.S. dkk. (eds.), *Belajar Civic Education Dari Amerika*, alih bahasa Syafruddin, M.Y. Alimi, & M. N. Khoiron. Yogyakarta: LKIS dan The Asia Foundation (TAF).
- Uslaner, E. M. & Conley, R. S. 2003. "Civic Engagement and Particularized Trust: The Ties that Bind People to Their Ethnic Communities", dalam *American Politics Research*, 31 (4), hlm. 331-360.
- Wardhani, I.S. 2012. "Paradoks di Wajah Kaum Muda", *Kompas*, 29 Oktober, hlm. 5.